



NOMOR 38

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 38 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA CIREBON
TAHUN 2011

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pupuk mempunyai peranan penting dan strategis untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang sangat terbatas, sehingga perlu dijamin kelancaran pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penggunaannya oleh petani dengan “prinsip enam tepat” yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Cirebon Tahun 2011 dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/ Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Nabati dan Pembenah Tanah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/2/2009 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida untuk Sektor Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/ Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/ Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/ Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 356/MPP140/MPP/Kep/3/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
29. Keputusan Gubernur Nomor 521.33/Kep.368-Binprod/2011 tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 521.33/Kep.764-Binprod/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.368-Binprod/2011 tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2011 Provinsi Jawa Barat;
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D).

31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
32. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA CIREBON TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pengkangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian di lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisika, kimia dan/atau biologi tanah.
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
12. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.

13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an-organik Urea, SP-36, ZA, NPK (Phonska atau Kujang) dan Pupuk Organik dalam kemasan lima puluh (50) kilogram, empat puluh (40) kilogram dan/atau dua puluh (20) kilogram oleh Pengecer Resmi di Lini IV kepada petani dan/kelompok tani yang dibeli secara tunai.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak.
15. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan dan udang.
16. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
17. Petani adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
18. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha maksimal 2 (dua) hektar.
19. Peternak adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
20. Pembudidaya Ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
21. Produsen adalah perusahaan di dalam negeri yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik Urea, SP-36, ZA dan NPK serta pupuk organik.

22. Penyalur Lini III/Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan/udang dan/atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
23. Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Kelurahan yang ditunjuk oleh Penyalur Lini III/Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat Kelompok tani.
24. Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut PJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Penyalur Lini III/Distributor atau antara Penyalur Lini III/Distributor dengan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi yang memuat hak dan kewajiban dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, meliputi pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan, yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara langsung bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

26. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi, sesuai ketentuan perundang-undangan.
27. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
28. Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
29. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Penyalur Lini III / Distributor dan Penyalur Lini IV / Pengecer Resmi adalah Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota termaksud Kecamatan dan/atau Desa / Kelurahan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani.
30. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik ibukota dari masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
31. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota Provinsi dari Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
32. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Penyalur Lini III/Distributor pupuk di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
33. Lini IV adalah lokasi gudang Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi pupuk di wilayah Kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Penyalur Lini III/Distributor.

34. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Cirebon yang selanjutnya disebut KPPP Kota Cirebon adalah wadah koordinasi instansi terkait di Kota Cirebon dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Walikota.

BAB II

PENGADAAN DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 terdiri dari pupuk an-organik : Urea, SP-36, ZA, NPK (Phonska dan/atau Kujang) serta pupuk organik sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Produsen wajib mengutamakan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan Sektor Pertanian dan Perikanan dalam negeri .
- (3) Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Rencana Kebutuhan.
- (4) Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi sesuai “prinsip 6 (enam) tepat”, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya di Lini IV.

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan atau udang, paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan perimbangan spesifik lokasi dan/atau standar teknis minimal dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kota serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kuota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember sebelum tahun berjalan.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui Petugas Teknis Pertanian setempat.
- (5) SKPD wajib melaksanakan pembinaan pada kelompok Tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di Kota.
- (6) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
 - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di Kota;

- b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di Wilayah Kecamatan di Kota;
 - c. Pengecer Resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah Kecamatan Kota.
- (7) Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi sesuai wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut :
- a. Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan;
 - b. Distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen dengan tembusan kepada Walikota, KP3 dan Kepala SKPD yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Kota paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan;
 - c. Pengecer Resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya dan harus disahkan oleh Lurah, Petugas Teknis Pertanian setempat dan diselesaikan paling lambat sebelum tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Produsen wajib memiliki dan atau menguasai gudang di Lini III di Kota serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal Produsen belum memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III Kota, dapat melayani Distributornya dari gudang Lini III Kota terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (3) Dalam hal menetapkan wilayah tanggung jawabnya, Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang masing-masing sebagai berikut :
 - a. Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/Kontrak;
 - b. Distributor menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Pengecer Resmi yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/Kontrak;
 - c. Pengecer Resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai “prinsip 6 (enam) tepat” dengan melakukan pencatatan penyalurannya kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kecamatan/Kelurahan di Kota secara ekonomi sulit dijangkau (remote), agar Produsen dan Distributor di Kota memperhatikan pendistribusiannya dengan mempertimbangkan HET.

- (2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan yang jalur distribusinya secara ekonomi lebih dekat terhadap wilayah Kota lain diatur lebih lanjut oleh Walikota atas rekomendasi Kepala SKPD untuk mendapat persetujuan KP3 Provinsi atas rekomendasi Kepala SKPD yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.
- (3) Untuk mengantisipasi dan pengendalian permasalahan serta pemecahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Walikota berperan serta secara aktif dan melaksanakan koordinasi dengan KP3 Kota dan Provinsi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal di Kota kekurangan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi (antar wilayah kecamatan) dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala SKPD sambil menunggu penetapan oleh Walikota guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (5) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi, Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diadakan dan atau diproduksi oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia dan atau PT Pupuk Sriwidjaja.

Pasal 9

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terkelupas, bertuliskan :

<p>“ <u>Pupuk Bersubsidi Pemerintah</u> “ Barang dalam Pengawasan</p>

- (2) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2011.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
- penyaluran pupuk bersubsidi di tingkatakan penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini II ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi dan Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi Penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota.

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|---------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.600,- |
| per kg | |
| b. Pupuk SP36 | = Rp. 2.000,- |
| per kg | |
| c. Pupuk ZA | = Rp. 1.400,- |
| per kg | |
| d. Pupuk NPK | = Rp. 2.300,- |
| per kg | |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- |
| per kg | |
- (3) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 12

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), Distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang **di wilayah kecamatan masing-masing** sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengaturan penyaluran yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh SKPD, Khusus bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

ORAGANISASI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sampai ke tingkat kelompok/petani, Walikota membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. Pengawasan terhadap penerapan norma dan standar teknis pengawasan pupuk bersubsidi di Kota ;
 - b. Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penggunaan serta mutu pupuk bersubsidi untuk pertanian;
 - c. Pembinaan kepada para petani, kios pengecer saprodi di daerah, tentang penanganan penyediaan, penyimpanan, mutu pupuk dan pestisida; dan
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan Tim Pengawasan Tingkat Pusat dan Provinsi.
- (4) Penyusunan laporan rekapitulasi pengawasan penyediaan, peredaran, pupuk bersubsidi di Kota sebagai bahan dalam perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV sesuai prinsip 6 tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian;
 - b. Distributor pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pengecer Resmi dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di Kota;
 - c. Walikota bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kota;

- d. Tim Teknis Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan atau KP3 Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Produsen selaku penanggung jawab wilayah;
 - e. Tim Teknis Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan atau KP3 Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan (THL-PPL) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT);
 - f. Guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, Gubernur dan Walikota melalui Tim Teknis Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan atau KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e berkewajiban membantu kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerja;
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Kepala SKPD atau Tim Pengawas Pupuk Kota yang membidangi (pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi), pejabat yang ditunjuk atau Tim Teknis Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan atau KP3 Kota.
- (4) Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan PPNS dan atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Walikota dan SKPD serta Tim Teknis Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kota dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri perdagangan tentang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Dalam keadaan yang mengisyaratkan kelangkaan pupuk bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Walikota melalui Tim Teknis Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kota.
- (3) Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasanya setiap bulan secara berkala kepada Walikota dan SKPD serta Tim Teknis Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan atau KP3 tingkat Kota dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (4) Pengecer Resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada SKPD dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan atau KP3 Kota wajib menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Walikota.
- (2) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini sebagai Pedoman dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Pertanian dan Perikanan di Kota Tahun 2011.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Juni 2011

WALIKOTA CIREBON,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 1 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 38